

**POLA DISTRIBUSI DAN MARGIN PEMASARAN GABAH  
DI KABUPATEN KARAWANG**

---

**JURNAL**

---

**Oleh**

**NURUL AENUNNISA**



**PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS  
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2017**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aenunnisa  
NIM : 23040113140038  
Program Studi : Agribisnis  
Alamat : Kp. Gempol Haji RT 03 RW 03 Ds. Jayamukt  
Kec. Banyusari Kab. Karawang, Jawa Barat 41377  
No Hp. : 08157607022  
Email : nurulaenunnisa@student.undip.ac.id/  
nuraennisa@gmail.com

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah yang berjudul:  
**POLA DISTRIBUSI DAN MARGIN PEMASARAN GABAH DI KABUPATEN KARAWANG**, dan penelitian yang berkaitan dengan karya tuils ilmiah ini merupakan hasil dari kinerja saya sendiri.
2. Setiap gagasan dan kutipan dari karya pihak lain berupa karya tulis yang telah publikasi atau bentuk lainnya dalam jurnal ini, telah diakui keasliannya sesuai prosedur disiplin ilmu.
3. Saya juga mengakui bahwa karya tulis ilmiah ini dapat dihasilkan atas bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu:  
**Ir. Djoko Sumardjono., M.S dan Dr. Ir. Mukson., M.S**

Apabila dikemudian hari dalam jurnal ini terdapat bukti yang menunjukkan kecurangan prosedur akademik yang dilakukan oleh saya, maka saya bertanggungjawab atas sanksi yang akan diberikan.

Semarang, 8 Mei 2017  
Penulis,



Nurul Aenunnisa  
NIM. 23040113140038

Pembimbing Utama



Ir. Djoko Sumardjono., M.S  
NIP. 19540412 198303 1 002

Pembimbing Anggota



Dr. Ir. Mukson., M.S  
NIP. 19600822 198703 1 002

## **POLA DISTRIBUSI DAN MARGIN PEMASARAN GABAH DI KABUPATEN KARAWANG**

*(Distribution Pattern and Marketing Margins of Rice Grain in Karawang Region)*

Nurul Aenunnisa, Djoko Sumarjono dan Mukson  
Program Studi S1 Agribisnis, Departemen Pertanian,  
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research was to analyze the difference between the basic production costs of paddy with floor price of government and not the government, analyzing the distribution pattern of rice grain and analyze marketing margins of rice grain in Karawang Region. The benefit from this research was to design and efficient the grain distribution in Karawang Region and this study can be used as reference for practitioners and stakeholder in taking policy on rice grain price. Methods used in this study was survey. The location was chosen by purposive. The amount of using the snowball method were farmer 57 respondents, middlemen 14 respondents and ricemill 11 respondents. The analysis was used by descriptive, statistics one Sample t-test and paired sample t - test, the calculation of the production cost of paddy, the percentage of patterns and the calculation of the margin marketing. The results showed that there was a differences significantly between the production costs of paddy (IDR.3,068) with the floor price of the government (HPP) (IDR.3,700) and not the government (IDR. 4,347). There were two patterns of marketing grain which was a pattern I (short pattern) there are farmers – ricemill and a pattern II (long pattern) there are farmers – middlemen – ricemill. Pattern II by 66% more than in the pattern I by 33%. The margin in the pattern II was IDR.250 per kilogram in contrast to the pattern I by IDR.0 per kilogram in significant.*

**Keyword** : *farming, production cost paddy, distribution pattern, marketing margin of rice grain*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia terutama dalam bidang pertanian telah mengarah pada upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani. Upaya tersebut ditunjukkan dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kegiatan ekonomi petani untuk mencapai produksi padi yang melimpah salah satunya Aspek Program Pemerintah dalam subsidi benih 0,4% dan pupuk 7% dari total subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2015).

Produksi padi dalam bentuk gabah yang melimpah pada saat panen raya menyebabkan timbulnya fluktuasi harga gabah di tingkat petani karena lonjakan volume hasil panen (Anjak, 2010). Salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi

harga di tingkat petani dan penggiling adalah peran para tengkulak yang menimbulkan adanya selisih harga pasar di tingkat petani dan penggiling dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) dan rantai pemasaran (Badan Pusat Statistik, 2015). Selisih harga GKP terjadi akibat adanya rantai pemasaran melalui tengkulak yang menekan petani dalam harga penjualan hasil panen selain itu permainan tengkulak akan memberikan penawaran harga yang tinggi terhadap penggiling. Selisih harga tersebut akan mempengaruhi harga beras yang akan ditawarkan oleh penggiling. Harga rata-rata GKP ditingkat petani dan penggiling pada Tahun 2016 di provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 4.554,51 dan Rp. 4.659,91 per kg (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>1</sup>.

Permasalahan diatas menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam upaya melindungi petani dari kerugian dan fluktuasinya harga GKP pada saat panen raya (Anjak, 2010). HPP juga bertujuan untuk memantau harga secara berkala agar terhindar dari permainan harga gabah oleh para tengkulak (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>2</sup>. Harga Pembelian Pemerintah ditetapkan berdasarkan INPRES 5/2015 tanggal 17 Maret 2015 melalui pembelian gabah/beras dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) (Badan Ketahanan Pangan Pertanian, 2015). Harga pembelian pemerintah yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 mengacu terhadap kenaikan jumlah kasus harga gabah di bawah HPP pada Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun terdahulu (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>2</sup>.

HPP pada Tahun 2015 sebesar Rp.3.700 belum sesuai dan tidak tepat digunakan pada Tahun 2017 disebabkan faktor nilai mata uang dan biaya pokok produksi padi pada Tahun 2017 berbeda dengan Tahun 2015 sehingga dapat mempengaruhi harga GKP di pasar. HPP yang bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian tercapai apabila total biaya pokok produksi padi tidak dibawah HPP dan petani memperoleh keuntungan dari budidaya. Keuntungan dipeoleh dari penjualan gabah dikurangi total biaya. Upaya petani dalam memperoleh keuntungan yaitu dengan memperoleh harga jual GKP yang tinggi. Tahun 2016 Harga GKP diatas HPP sebesar 94,74%, dan Harga GKP sama dengan HPP sebesar 2,62% (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>3</sup>. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dominan petani lebih banyak menjual GKP di luar pemerintah dibandingkan di dalam pemerintah karena harga gabah yang ada di pasaran lebih tinggi dari harga dasar atau HPP yang ditetapkan oleh pemerintah (Mardianto *et al.*, 2005). Harga jual gabah di Kabupaten Karawang pada Tahun 2015 ditingkat petani melebihi harga pembelian pemerintah. Rata-rata harga GKP saat itu dibeli oleh tengkulak di atas Rp.4.200/Kg (Kadarrisman, 2016). Peran tengkulak dalam rantai pemasaran gabah akan menyebabkan perubahan harga dan saluran dalam rantai pemasaran.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu sentra padi di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik Karawang, 2016). Kabupaten Karawang merupakan Produksi tertinggi ke-2 di Jawa Barat sebesar 1.028.009 ton setelah Kabupaten Indramayu sebesar 1.294.158 ton (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2016) Provinsi Jawa Barat juga memiliki produktivitas tanaman padi kedua tertinggi di Indonesia yaitu 6,122 ton/ha (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>4</sup>. Tahun

2015 produksi padi sawah di Karawang mencapai 1.532.055 ton sedangkan produksi padi ladang mencapai 6,261 ton (Badan Pusat Statistik Karawang, 2016).

Seluruh permasalahan di atas, memerlukan kajian tentang perbedaan harga gabah pembelian pemerintah dan non pemerintah dengan biaya pokok budidaya padi, pola distribusi, dan perhitungan margin pemasaran. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Pola Distribusi dan Margin Pemasaran Gabah di Kabupaten Karawang” dalam mengkaji stabilisasi harga gabah, pemasaran gabah, dan mengulas kembali harga pembelian pemerintah tentang gabah sehingga dapat mengefisiensi distribusi gabah.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis perbedaan biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian pemerintah dan non pemerintah (2) Menganalisis pola distribusi gabah (3) Menganalisis margin pemasaran gabah dalam rantai distribusi gabah di Kabupaten Karawang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Kerangka Pemikiran**

Gabah merupakan bahan pokok pangan apabila telah diolah dan dipisahkan antara sekam, dedak dan daging gabah hingga merubah fisik menjadi beras yang kemudian dikonsumsi oleh seluruh insan dunia, terkhusus masyarakat Indonesia yang konsumsi pangan pokok utama adalah beras. Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Bab 1, Pasal 1, Ayat 12 dan 15 yaitu “Distribusi pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat”. Serta “Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat”. Mengulas peraturan yang ditetapkan di atas permasalahan fluktuatifnya harga beras dibidang pemasaran akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Salah satu faktor tersebut adalah ketimpangan harga pasar pada tingkat petani dan penggiling terhadap harga gabah yaitu Gabah Kering Panen (GKP).

Ketimpangan harga menunjukkan bahwa adanya selisih harga yang diterima petani dengan yang dibayarkan oleh penggiling. Selisih harga terjadi diakibatkan oleh adanya rantai pemasaran atau pola distribusi antara petani dengan penggiling.

Pemerintah telah berupaya dalam stabilisasi harga gabah di pasar agar petani dapat terlindungi kesejahteraannya dari ancaman tekanan harga penyalur dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga dasar (*Floor Price*). Faktanya, harga pembelian pemerintah yang telah ditetapkan belum sepenuhnya menguntungkan bagi petani dalam menstabilkan harga pasar. Hal tersebut disebabkan HPP belum dapat menutupi Beban biaya operasional budidaya yang dikeluarkan oleh petani sehingga penerimaan harga jual GKP per

kilogram lebih besar dari HPP yang telah ditetapkan pemerintah. Permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas maka diperlukannya survey rantai penyaluran gabah sehingga dapat efisien, meninjau margin pemasaran gabah dan bagaimana perbedaan harga dasar yang ditetapkan pemerintah dengan beban biaya operasional budidaya tanaman padi yang menjadi faktor keuntungan dan menguntungkan bagi petani.

### Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan metode survei. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* diambil dengan sample 3 kecamatan yaitu Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Majalaya. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari – 23 Februari 2017. Metode penentuan jumlah sampel bagi petani dilakukan secara *Snowball sampling* dan penentuan responden yang dipilih dilakukan secara *purposive*. Jumlah sampel yang diperoleh yaitu 82 responden dengan formula 69,51% responden petani, 17,07% responden tengkulak dan 13,42% responden penggiling. Lokasi dan jumlah responden dapat di lihat di Tabel 1.

Tabel 1. Lokasi Penelitian dan Jumlah Sampel

No	Lokasi Penelitian	Sampel					
		Petani		Tengkulak		Penggiling	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
		-Jiwa-	--%--	-Jiwa-	--%--	-Jiwa-	--%--
1	Rawamerta	18	31,58	3	21,43	4	36,36
2	Karawang Barat	22	38,62	7	50,00	1	9,09
3	Majalaya	17	29,82	4	28,57	6	54,55
	Total	57	100,00	14	100,00	11	100,00

Sumber : Data Primer Terolah, 2017

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dengan cara langsung melalui wawancara yang berpedoman pada kuesioner kepada petani, tengkulak penggiling dan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi yang relevan seperti BPS, Bapedda, dan sumber lainnya.

### Analisis Data

Analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama, perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan Harga Pembelian Pemerintah dan non pemerintah diuji dengan analisis *one sample t-test* untuk Harga Pembelian Pemerintah dan *paired sample t-test* untuk harga pembelian non pemerintah.

Biaya Pokok Produksi (PP) merupakan Total biaya yang dikeluarkan (*Total Cost*) dibagi dengan jumlah produksi. Rumus statistik sebagai berikut:

$$PP = TC / S \dots\dots\dots (1)$$

- Keterangan :
- PP : Biaya Pokok Produksi (Rp/kg)
  - TC : Total Biaya (Rp)
  - S : Jumlah produksi (kg)

- a) Perbedaan harga gabah antara biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian pemerintah di uji dengan *one sample t-test*.

Merumuskan hipotesis statistik

$$H_0 : \mu_1 = \text{Rp. 3.700}$$

(Tidak terdapat perbedaan antara beban pokok produksi padi dengan harga pembelian pemerintah).

$$H_1 : \mu_1 \neq \text{Rp. 3.700}$$

(Terdapat perbedaan antara beban biaya pokok produksi padi dengan dengan harga pembelian pemerintah).

- b) Perbedaan harga gabah antara biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian non pemerintah diuji dengan *Paired sample t-test*.

Merumuskan hipotesis statistik

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

(Tidak terdapat perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian non pemerintah).

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

(Terdapat perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian non pemerintah)

Keterangan :  $\mu_1$  : Biaya pokok produksi padi.

$\mu_2$  : Harga pembelian non pemerintah

Rp. 3.700 : Harga pembelian pemerintah komoditas gabah.

$H_0$  ditolak jika signifikansi kurang dari 5% (0,050).

2. Hipotesis kedua, pola distribusi diambil berdasarkan lembaga keuangan yang terlibat. Diuji dengan analisis deskriptif persen

Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti dikemukakan Fauzy (2011) adalah sebagai berikut:

$$P = F / N \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan: P : Nilai Persentase (%)

F : Frekuensi (Jiwa)

N : Jumlah responden (Jiwa)

- 3) Hipotesis ketiga, analisis margin pemasaran di uji dengan perhitungan margin dan *One Sample T-Test*

Menurut Fanini (2012) Perhitungan margin pemasaran digunakan rumus:

$$Mm = Pr - Pf \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan: Mm: Margin pemasaran di tingkat petani (Rp).

Pr : Harga di tingkat kelembagaan pemasaran tujuan pemasaran dari petani (Rp).

Pf : Harga di tingkat petani (Rp).

Adanya margin menunjukkan adanya selisih harga dari petani hingga penggilingan. Hasil perhitungan margin kemudian diuji beda one sample t-test dengan SPSS.

Merumuskan hipotesis statistik

$$H_0 : \mu_1 = 0$$

(Tidak terdapat perbedaan antara margin pola pendek dengan margin pola panjang).

H1 :  $\mu_1 \neq \text{Rp. } 3.700$

(Terdapat perbedaan antara margin pola pendek dengan margin pola panjang).

Keterangan:  $\mu_1$  : Margin pola panjang

0 : Margin pola pendek

Seluruh perhitungan untuk analisis data dengan menggunakan Mr. Excel 2010 dan SPSS 22.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Uraian	Petani		Tengkulak		Penggiling	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	-Jiwa-	--%--	-Jiwa-	--%--	-Jiwa-	--%--
	a. Laki-laki	57	100,00	14	100,00	11	100,00
	b. Perempuan	0	100,00	0	100,00	0	100,00
2	Usia						
	a. 31 – 40	15	26,32	10	71,43	5	45,46
	b. 41 – 50	18	31,58	4	28,57	3	27,27
	c. 51 – 60	16	28,07	0	0,00	3	27,27
	d. 61 – 70	6	10,53	0	0,00	0	0,00
	e. >71	2	3,51	4	28,57	6	54,55
3	Pendidikan Akhir						
	a. Tidak Sekolah	11	19,30	2	14,28	2	18,18
	b. SD	28	49,12	6	42,86	3	27,27
	c. SMP	12	21,05	4	28,58	1	9,09
	d. SMA	3	5,26	2	14,28	5	45,46
	e. Perguruan Tinggi	3	5,26	0	0,00	0	0,00
4	Pekerjaan Utama						
	a. Petani	55	96,49	3	21,43	1	9,09
	b. Guru	1	1,75	0	0,00	0	0,00
	c. Pedagang	1	1,75	0	0,00	0	0,00
	d. Wirausaha	0	0,00	11	78,57	10	90,91
5	Pekerjaan Sampingan						
	a. Petani	2	3,51	0	0,00	10	90,91
	b. Tidak Ada	55	96,49	11	78,57	0	0,00
	c. Wirausaha	0	0,00	3	21,43	1	9,09
6	Lama Usahatani						
	a. 1 – 10	16	28,07	8	57,14	0	0,00
	b. 11 – 20	10	17,54	6	42,85	6	54,54
	c. 21 – 30	17	29,82	0	0,00	5	45,46
	d. 31 – 40	11	19,30	0	0,00	0	0,00
	e. 41 – 50	3	5,26	0	0,00	0	0,00

Sumber : Data Primer Terolah, 2017



Tabel 2. (Lanjutan)

No	Uraian	Petani		Tengkulak		Penggiling	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
7	Luas Lahan	-Jiwa-	--%--	-Jiwa-	--%--	-Jiwa-	--%--
	a. 1 – 3	48	84,21	0	0,00	0	0,00
	b. 4 – 5	5	8,77	0	0,00	0	0,00
	c. 6 – 8	1	1,75	0	0,00	0	0,00
	d. 9 – 10	2	3,51	0	0,00	0	0,00
	e. > 10	1	1,75	0	0,00	0	0,00
8	Produksi Gabah						
	a. < 4	1	1,75	0	0,00	0	0,00
	b. 4 – 5	3	5,26	0	0,00	0	0,00
	c. 5 – 6	24	42,11	0	0,00	0	0,00
	d. 6 – 7	21	36,84	0	0,00	0	0,00
	e. 7 – 8	8	14,04	0	0,00	0	0,00
9	Daerah Distribusi						
	a. Karawang	0	0,00	3	21,43	0	0,00
	b. Karawang, Bogor	0	0,00	2	14,28	0	0,00
	c. Karawang, Banten	0	0,00	2	14,28	0	0,00
	d. Karawang, Jakarta	0	0,00	5	35,71	0	0,00
	e. Karawang, Lampung	0	0,00	1	7,15	0	0,00
	f. Pulau Jawa	0	0,00	1	7,15	0	0,00
	g. Pasar Induk Cipinang Jakarta, Pasar Johar Karawang, Tengkulak, Penggiling Menir.	0	0,00	0	0,00	1	9,09
	h. Pasar Induk Cipinang Jakarta, Pasar Johar Karawang, Tengkulak, Penggiling Menir.	0	0,00	0	0,00	2	14,28
	i. Pasar Induk Cipinang Jakarta, Pasar Johar Karawang, Tengkulak, Penggiling Menir, Bulog, Konsumen	0	0,00	0	0,00	8	72,73

Sumber : Data Primer Terolah, 2017

Tabel 2. (Lanjutan)

No	Uraian	Petani		Tengkulak		Penggiling	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
10	Sumber Bahan Baku Penggiling	-Jiwa-	--%--	-Jiwa-	--%--	-Jiwa-	--%--
	a. Tengkulak	0	0,00	0	0,00	10	90,91
	b. Petani, Tengkulak	0	0,00	0	0,00	1	9,09

Sumber : Data Primer Terolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2 Petani yang menjadi responden di dominasi dengan jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, petani berada pada usia produktif yaitu berada pada usia 10 – 30 tahun, pekerjaan utama sebagai petani, lama bertani lebih dari 3 tahun, luas lahan garapan > 1 Ha. Kebanyakan petani menjual ke tengkulak dan penggiling. Tengkulak dan penggiling yang menjadi responden di dominasi dengan jenis kelamin laki-laki, pendidikan tengkulak berada pada jenjang SD dan penggiling berada pada jenjang SMA, tengkulak dan penggiling berada pada usia produktif antara 30 – 40 tahun, pekerjaan utama sebagai wirausaha, lama usaha berada pada 1 – 30 tahun, pendistribusian di daerah lokal dan non lokal.

### Biaya Budidaya Padi

Biaya operasional budidaya tanaman padi merupakan keseluruhan beban biaya yang dikeluarkan dalam satu kali produksi. Produksi budidaya tanaman padi dilakukan oleh petani di Kabupaten Karawang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Ekowati *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa struktur biaya produksi atau operasional terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Sugiarto (2007) juga mengungkapkan bahwa biaya produksi merupakan keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Ringkasan dari biaya tetap dan biaya variabel dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Rata-rata Biaya Operasional Budidaya Tanaman Padi pada Musim Tanam Rendeng (Oktober – Maret) di Kabupaten Karawang.

No	Jenis Biaya	Jumlah	Persentase
		----- Rp -----	--- % ---
1	Biaya Tetap	4.134.870	18,63
2	Biaya Variabel	18.061.739	81,37
Total		22.196.609	100,00

Sumber : Data Primer Terolah, 2017

Berdasarkan Tabel 14, persentase biaya tertinggi antara biaya tetap dan biaya variabel berada pada biaya variabel dengan beban biaya sebesar Rp.18.061.739 dengan persentase 81,37% dari biaya operasional budidaya tanaman padi sebesar Rp. 22.196.609. Kondisi tersebut terjadi karena beban biaya variabel pada setiap produksi akan selalu berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan pada proses produksi.

### **Pendapatan Budidaya Tanaman Padi**

Beban biaya yang telah dikeluarkan sama dengan aktivitas produksi telah menghasilkan atau tidak menghasilkan produk. Pada penelitian ini produk yang dihasilkan adalah gabah kering panen. Aktivitas produksi berakhir maka biaya operasional dapat diperhitungkan. Biaya operasional budidaya padi di Kabupaten Karawang sebesar Rp. 22.196.609. Biaya pokok produksi diperoleh sebesar Rp.3.068 per kilogram. Harga Pembelian Pemerintah lebih besar dibandingkan dengan biaya pokok produksi padi yaitu harga pembelian pemerintah sebesar Rp.3.700 dan biaya pokok produksi padi sebesar Rp.3.068.

Penjualan dengan harga Rp.4.347 yang dikalikan dengan produktivitas maka petani memperoleh penerimaan sebesar Rp. 68.924.857. Perolehan pendapatan petani permusim sebesar Rp. 46.728.248 dan pendapatan perhari petani sebesar Rp. 255.346. Biaya, harga dan pendapatan yang diuraikan di atas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Rata-rata Pendapatan Budidaya Tanaman Padi pada Musim Tanam Rendeng (Oktober – Maret) di Kabupaten Karawang.

No	Uraian / Rumusan	Nilai
1	Biaya Operasional Budidaya Padi (Rp)	22.196.609
2	Produksi Rata-rata (kg)	7.234
3	Beban Biaya Pokok Produksi Padi (Rp/kg) / 1:2	3.068
4	Harga Jual GKP (Rp)	4.347
5	Penerimaan (Rp) /4 x 2	68.924.857
6	Pendapatan Permusal (Rp) / 5 – 1	46.728.248
7	Pendapatan Perhari (Rp) / 6 : 183 hari	255.346

Sumber : Data Primer Terolah, 2017.

### **Analisis Perbedaan Biaya Operasional Budidaya Padi dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Non Pemerintah**

Biaya pokok produksi padi perkilogram sebesar Rp.3.068 merupakan beban biaya keseluruhan selama aktivitas produksi tanaman padi artinya perhitungan tersebut petani belum memperoleh keuntungan. Pemerintah membeli gabah di petani yang ditetapkan dalam INPRES 5/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan harga gabah kering panen maksimum diberikan harga Rp.3.700. Harga pembelian pemerintah dengan harga tersebut tidak seluruh petani dapat menutupi biaya pokok produksi padi, hal ini sesuai dengan data perhitungan hasil analisis data pada perhitungan biaya pokok produksi padi. Biaya pokok produksi responden petani yang telah dibandingkan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) diperoleh hasil bahwa masih ada responden petani yang biaya pokok produksi padi diatas harga pembelian pemerintah (HPP), perolehan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5, responden yang memperoleh harga biaya pokok produksi padi dibawah harga pembelian pemerintah berjumlah 49 jiwa dengan persentase 85,96% dari keseluruhan jumlah responden. 49 responden petani apabila menjual gabah kepada pemerintah (HPP) masih memperoleh keuntungan sedangkan 8 responden yang memperoleh biaya pokok produksi diatas harga

pembelian pemerintah (HPP) petani akan mengalami kerugian sebab biaya pokok produksi padi lebih besar dibandingkan dengan harga pembelian pemerintah.

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Responden Petani yang Memperoleh Perhitungan Biaya Pokok Produksi Padi dengan Harga Dibawah HPP dan Diatas HPP

No	Biaya Pokok Produksi Padi dengan Harga Pembelian Pemerintah	Jumlah	Persentase
		-jiwa-	--%--
1	Dibawah HPP	49	85,96
2	Diatas HPP	8	14,04

Sumber : Data Primer Terolah, 2017.

Harga pembelian pemerintah yang telah ditetapkan dalam INPRES 5/2015 tanggal 17 Maret 2015 maka perlu dikaji kembali karena masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan keuntungan apabila harga pembelian pemerintah masih dengan harga Rp.3.700. Biaya pokok produksi padi apabila perbedaannya tidak jauh berbeda, maka petani tidak sejahtera karena pendapatan yang diperoleh sangat minimum hal ini akan melanggar UU RI No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada pasal 3 ayat 3 perihal perlindungan petani dari frekuensi harga, praktik ekonomi biaya yang tinggi dan gagal panen dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 7 ayat 2 tentang strategi perlindungan petani yang dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dan asuransi pertanian.

Perbandingan biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian pemerintah diuji dengan *One Sample t-test* melalui aplikasi SPSS. Hasil uji *One Sample t-test* dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis *One Sample t-test* untuk Perbandingan Biaya Pokok Produksi Padi dengan Harga Pembelian Pemerintah dan *Paired Sample t-test* untuk perbandingan Biaya Pokok Produksi Padi dengan Harga Pembelian Non Pemerintah .

No	Pembanding Biaya Pokok Produksi Padi	Nilai Test	t Hitung	Signifikansi
1	Harga Pembelian Pemerintah	3.700	8,909	0,000
2	Harga non pemerintah	4.347,368421	18,029	0,000

Sumber : Data Primer Terolah SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 6, perbedaan antara biaya pokok budidaya padi dengan harga pembelian pemerintah diperoleh nilai *Sig (2-tailed)* sebesar 0,000. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) pada penelitian ini yaitu 5%. Karena  $\alpha = 0,00 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan pengambilan keputusan menghasilkan hasil yaitu  $H_0$  ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95%. Terdapat perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian pemerintah.

Petani di Kabupaten Karawang umumnya tidak menjual gabah kering panen ke lembaga pemerintah melalui bulog akan tetapi petani menjualnya ke lembaga non pemerintah yang didistribusikan ke tengkulak atau penggiling langsung. Petani memilih menjual ke non pemerintah disebabkan harga yang ditawarkan tengkulak dan petani lebih besar dibandingkan dengan harga pembelian pemerintah. Harga yang ditawarkan tengkulak atau penggiling langsung akan menguntungkan petani dibandingkan dengan harga pembelian pemerintah. Perbedaan harga antara harga pembelian pemerintah dan non pemerintah sangat terlihat jelas. Harga pembelian pemerintah sebesar Rp.3.700 sedangkan harga pembelian non pemerintah sebesar Rp.4.347.

Perbedaan nilai tersebut diperlukannya bukti otentik dengan cara pengujian dengan analisis *Paired Sample t-test* antara biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian non pemerintah. Hasil tersebut kemudian dibandingkan antara harga pembelian pemerintah dengan non pemerintah yang memiliki nilai signifikansi sangat signifikan. Hasil uji *Paired Sample t-test* dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6, perbedaan antara biaya pokok budidaya padi dengan harga pembelian non pemerintah diperoleh nilai *Sig (2-tailed)* sebesar 0,000. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) pada penelitian ini yaitu 5%. Karena  $\alpha = 0,00 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95%, Terdapat perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian non pemerintah.

Perbandingan biaya pokok budidaya padi dengan pemerintah dan non pemerintah memiliki nilai signifikansi memiliki nilai yang sama yaitu 0,00 namun angka harga pembelian non pemerintah yang lebih besar dari harga pembelian pemerintah sangat menarik petani untuk menjual ke non pemerintah. Mardianto *et al.* (2005) mengungkapkan bahwa dominan petani lebih banyak menjual GKP di luar pemerintah dibandingkan di dalam pemerintah karena harga gabah yang ada di pasaran lebih tinggi dari harga dasar atau HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadarrisman (2016) memperkuat pendapat sebelumnya dengan mengungkapkan bahwa harga jual gabah pada Tahun 2015 ditingkat petani melebihi harga pembelian pemerintah dengan GKP sebesar Rp.3.700/kg. Harga GKP saat itu dibeli oleh tengkulak rata-rata di atas Rp.4.200/Kg.

### **Analisis Pola dan Margin Distribusi Pemasaran Gabah Pola Distribusi Pemasaran**

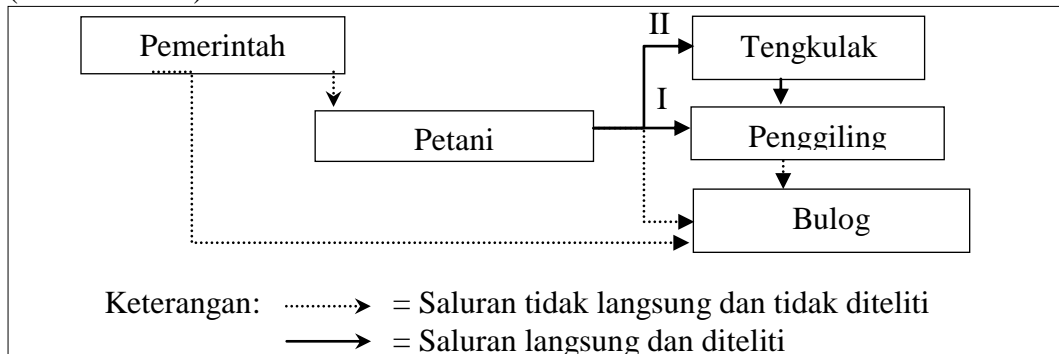
Pola distribusi pada penelitian ini yaitu menyalurkan barang dengan komoditas gabah sehingga gabah dapat diolah menjadi beras. Pola distribusi pemasaran gabah di kabupaten Karawang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Respoden dalam Memilih Pola Distribusi Pemasaran Gabah di Kabupaten Karawang

Pola	Deskripsi	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
			-Jiwa-	--%--
I	Pola rantai pendek	Petani - Penggiling langsung	19	33
II	Pola rantai panjang	Petani - Tengkulak – Penggiling	38	67

Sumber : Data Primer Terolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 6, pola satu merupakan pola rantai pemasaran melalui alur distribusi dari petani yang menjual gabah ke penggiling langsung yang kemudian dijadikan bahan baku penggilingan oleh penggiling. Sedangkan pola dua merupakan pola rantai pemasaran melalui alur distribusi dari petani yang menjual gabahnya kepada tengkulak kemudian tengkulak disalurkan kembali ke penggiling untuk diolah menjadi beras dan menjadi bahan baku dalam penggilingan. Alur pola distribusi pemasaran dapat dilihat pada Ilustrasi 1. Madiarto *et al.*, (2005) mengungkapkan bahwa pola pemasaran gabah di Jawa Barat terbagi kedalam beberapa pola diantaranya pola satu petani menyalurkan ke pedagang atau penggilingan dan ke dua petani menyalurkan gabah ke pedagang desa atau tengkulak kemudian ke pedagang atau penggiling. Qhoirunisa (2014) juga mengungkapkan 55,9% petani akan menyalurkan gabah ke pedagang pengepul tingkat desa atau tengkulak kemudian disalurkan kembali ke penggiling dan 23,5% petani akan menyalurkan gabah ke penggilingan padi secara langsung dan 20,6% petani akan menyalurkan gabah ke Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).



Ilustrasi 1. Struktur Distribusi Pemasaran Gabah

### Margin Distribusi Pemasaran

Margin distribusi pemasaran merupakan selisih harga yang terjadi dalam penyaluran barang dan jasa. Pada penelitian ini margin distribusi pemasaran dan rata-rata yang mendapat margin dari pola I dan II dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Biaya dan Persentase Margin Pemasaran Gabah Pola I dan Pola II di Kabupaten Karawang

Lembaga	Uraian	Pola I		Pola II	
		Biaya	Persentase	Biaya	Persentase
		-Rp/kg-	--%--	-Rp/kg-	--%--
Petani	a. Harga Jual GKP	4.500	100,00	4.347	94,56
Tengkulak	a. Harga Beli GKP	0	0,00	4.347	94,56
	b. Margin Pemasaran	0	0,00	250	5,44
	➤ Biaya Pemasaran	0	0,00	176	3,83
	➤ Margin Keuntungan	0	0,00	74	1,61
	c. Harga Jual	0	0,00	4.597	100,00
Penggiling	a. Harga Beli GKP	4.500	100,00	4.597	100,00

Sumber : Data Primer Terolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa pola I tidak terjadi transaksi pemasaran disebabkan penyaluran gabah dilakukan secara langsung atau tidak adanya perantara antara petani dengan penggiling. Hal ini menunjukkan bahwa harga jual GKP ditingkat petani dan harga beli GKP ditingkat penggiling tidak adanya selisih harga sehingga margin pada pola I sama dengan nol. Berbeda dengan pola II, distribusi pemasaran gabah pada pola II terlihat adanya penyalur yaitu tengkulak. Persentase pembelian gabah ditingkat penggiling sebesar 100% dan penerimaan gabah di tingkat petani sebesar 94,56%. Hal ini terjadi karena 5,44% margin pemasaran diperoleh oleh tengkulak dan 1,61% merupakan perolehan keuntungan perdagangan tengkulak. Menurut Mardianto *et al.* (2005) mengungkapkan bahwa margin keuntungan perdagangan gabah di Kabupaten Karawang cukup efisien karena berada pada angka antara 1,33 – 16,12%. Pengukuran dengan nilai cukup efisien disebabkan tingkay persaingan antar pedagang yang cukup besar.

Perbandingan nilai margin antara pola I dengan pola II dikatakan lebih efisien pada pola I karena dilihat dari nilai *farmer share* sebesar 100% artinya artinya perolehan yang diterima oleh petani sebesar 100%. Perbandingan antara pola I dengan pola II dilakukan dengan pengujian secara statistik dengan menggunakan analisis *One Sample t – test* yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Analisis *One Sample t – test* Margin Pemasaran.

Pembanding	Margin Pola Panjang
Nilai Test	0
t Hitung	120,380
Signifikansi	0,000

Sumber : Data Primer Terolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 27, perbedaan antara margin pola pendek dengan margin pola panjang diperoleh hasil nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) pada penelitian ini yaitu 5%. Karena  $\alpha = 0,00 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan pengambilan keputusan menghasilkan hasil yaitu  $H_0$  ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95%. Terdapat perbedaan nilai margin dari masing-masing pola.

Petani akan lebih menguntungkan apabila melakukan pemotongan rantai dan melakukan distribusi pemasaran dengan pola I. Nilai margin uraian diatas menunjukkan bahwa dengan memotong saluran pemasaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yang dibuktikan dengan pola rantai pendek memiliki nilai 0.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan secara signifikan antara biaya pokok produksi padi (Rp.3.068) dengan harga gabah pembelian pemerintah (Rp.3.700) dan non pemerintah (Rp. 4.347).

2. Terdapat dua pola pemasaran gabah yaitu pola I (pola pendek) terdiri dari petani – penggiling dan pola II (pola panjang) terdiri dari petani – tengkulak – penggiling. Pola II sebesar 66% lebih besar dari pada pola I sebesar 33%.
3. Nilai margin pada pola II sebesar Rp. 250 per kilogram berbeda dengan pola I Rp.0 per kilogram secara signifikan.

### **Saran**

Saran pada penelitian ini yaitu:

1. Mengingat biaya pokok budidaya padi lebih besar dari pada harga pembelian pemerintah maka diperlukan peningkatan nilai harga pembelian pemerintah. Hal ini agar petani tidak mengalami kerugian dan petani memperoleh pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan petani menjadi sejahtera.
2. Disarankan Petani menggunakan pola I karena pada pola I yaitu petani yang menjual ke penggiling langsung tidak memiliki nilai margin atau nilai margin sama dengan Rp. 0 . Hal ini dapat dilakukan dengan cara jalinan kerjasama atau bermitra antara petani dengan penggiling.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anjak. 2010. Kajian harga pembelian pemerintah (hpp) gabah - beras kasus Provinsi Jawa Barat. J. Pse Litbang Pertanian : 1 – 26. [www.pse.litbang.pertanian.go.id](http://www.pse.litbang.pertanian.go.id). Diakses pada tanggal 4 April 2017.
- Badan Ketahanan Pangan Pertanian. 2015. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Presiden Republik Indonesia, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2015. Evaluasi Statistik Harga Produsen Gabah. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2016. Padi menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (ton), 2010-2015. BPS Jawa Barat, Bandung. Tidak diterbitkan. [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id). Diakses pada tanggal 19 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik Karawang. 2016. Karawang Dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik, Karawang.
- Badan Pusat Statistik. 2016<sup>1</sup>. Rata-rata harga gabah menurut kualitas, komponen mutu dan hpp di tingkat penggilingan di Indonesia, 2008-2016. BPS Pusat, Jakarta. Tidak diterbitkan. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada tanggal 9 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2016<sup>2</sup>. Rata-rata harga gabah menurut kualitas, komponen mutu dan hpp di tingkat petani di Indonesia, 2008-2016. BPS Pusat, Jakarta. Tidak diterbitkan. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada tanggal 9 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2016<sup>3</sup>. Statistik Harga Produsen Gabah di Indonesia 2016. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016<sup>4</sup>. Produktivitas padi menurut Provinsi (kwintal/ha), 1993 – 2015. BPS Pusat, Jakarta. Tidak diterbitkan. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada tanggal 29 Maret 2017.



- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksana APBN. 2015. Permasalahan dan upaya peningkatan produktivitas pertanian. SETJEN RI. [www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_permasalahan\\_dan\\_upaya\\_peningkatan Produktivitas\\_pertanian20140821143024.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_permasalahan_dan_upaya_peningkatan Produktivitas_pertanian20140821143024.pdf). 22 Mei 2017
- Ekowati, T., D. Sumardjono dan H. Setiyawan. 2014. Usahatani. Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fauzy, A. 2011. Statistik Industri Cetakan 4. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kadarrisman. 2016. Karawang Surplus Beras 500 Ribu Ton Per Tahun. Pikiran Rakyat. 2 Desember 2016 Pukul 15.04 WIB.
- Mardianto, S., Y. Supriatna dan N.K. Agustin. 2005. Dinamika pola pemasaran gabah dan beras di Indonesia. J. Forum Penelitian Agro Ekonomi 23 (2) :116 – 131
- Qhoirunisa, A.S. 2014. Rantai Pasok Padi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Tesis. Online. [www.repository.ipb.ac.id](http://www.repository.ipb.ac.id). Diakses pada tanggal 4 April 2017.
- Sugiarto., T. Herlambang., Bastoro., R. Sudjana dan S. Kelana. 2007. Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.